

## PERGANTIAN PANGLIMA TNI DAN KOMITMEN PENGUATAN PROFESIONALISME TNI

1

Aulia Fitri

### Abstrak

*Laksamana TNI Yudo Margono diusulkan sebagai calon tunggal Panglima TNI berdasarkan Surat Presiden yang disampaikan ke DPR RI. Rotasi antarmatra menjadi salah satu pertimbangan pengusulan calon panglima dari matra laut. Isu mengenai masa jabatan yang singkat menjadi diskursus publik terkait realisasi implementasi target kinerja. Dengan masa jabatan yang relatif singkat, calon Panglima TNI akan dihadapkan pada agenda-agenda strategis yang belum tuntas pada kepemimpinan Panglima TNI sebelumnya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tantangan keberlanjutan penguatan profesionalisme TNI dalam menjalankan fungsinya sebagai alat pertahanan negara. Terdapat lima agenda yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan organisasi TNI; penataan organisasi TNI, evaluasi kecelakaan alutsista dan keselamatan prajurit, penguatan interoperabilitas antarmatra, diplomasi pertahanan dan kesejahteraan prajurit. DPR RI memegang peranan krusial dalam memberikan persetujuan atas usulan Presiden. Komisi I DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong komitmen penguatan profesionalisme TNI dan secara objektif berperan dalam pelaksanaan fit and proper test.*

### Pendahuluan

Ketua DPR RI mengumumkan calon tunggal Panglima TNI atas nama Laksamana TNI Yudo Margono berdasarkan Surat Presiden (Surpres) Nomor R-60/Pres/1/2022 yang disampaikan pada 28 November 2022 (Republika, 29 November 2022: 3). Pergantian Panglima TNI menjadi isu yang ramai diperbincangkan menjelang Jenderal Andika Perkasa memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022 mendatang. Masa jabatan Jenderal Andika sebagai Panglima TNI yang singkat selama 13 bulan, sempat membuka diskursus

publik terkait dengan kesanggupan untuk menyelesaikan target kinerja. Meski menjadi sorotan publik, isu mengenai masa jabatan yang singkat tidak menjadi masalah bagi Presiden Joko Widodo dalam menunjuk kandidat calon Panglima TNI selanjutnya. Laksamana TNI Yudo Margono saat ini berusia 57 tahun. Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, batas usia pensiun perwira TNI adalah 58 tahun. Artinya Laksamana TNI Yudo Margono hanya memiliki masa bakti sebagai Panglima TNI selama satu tahun (Kompas, 25 November 2022: 3).



Dalam masa jabatan yang relatif singkat, Laksamana TNI Yudo Margono dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial dan strategis yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan pada sektor pertahanan, terutama penguatan profesionalisme TNI agar semakin optimal pada fungsi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman lingkungan strategis. Penguatan profesionalisme TNI penting untuk terus dilaksanakan, mengingat masih adanya berbagai pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, seperti penataan *rightsizing* dalam organisasi TNI, kecelakaan alutsista dan keselamatan prajurit, interoperabilitas antarmatra, optimalisasi diplomasi pertahanan, serta kesejahteraan prajurit. Penguatan profesionalisme TNI diharapkan mampu membangun kekuatan TNI sehingga dapat menghadapi ancaman lingkungan strategis dan geopolitik global yang bergerak dinamis. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dalam penguatan profesionalisme TNI dalam menjalankan fungsinya sebagai alat pertahanan negara.

## Mekanisme Pergantian Panglima TNI

Panglima TNI adalah perwira tinggi militer yang memimpin organisasi TNI. Dalam masa pergantiannya, calon Panglima TNI diusulkan oleh Presiden dan disetujui oleh DPR. Syarat mengenai calon Panglima TNI diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Posisi Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari masing-masing angkatan yang sedang atau

pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan (tempo.co, 28 November 2022).

Meski disebutkan dalam Undang-Undang TNI bahwa kedudukan Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh tiap-tiap matra, penunjukan calon Panglima TNI dikembalikan pada hak prerogatif Presiden. Merujuk pada tren pengangkatan Panglima TNI pascareformasi, secara umum rotasi antarmatra pada posisi Panglima TNI telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat melalui komposisi angkatan yang pernah menjadi Panglima TNI; Laksamana Widodo (Angkatan Laut), Jenderal Endriartono Sutarto (Angkatan Darat), Marsekal Djoko Suyanto (Angkatan Udara), Jenderal Djoko Santoso (Angkatan Darat), Laksamana Agus Suhartono (Angkatan Laut), Jenderal Moeldoko (Angkatan Darat), Jenderal Gatot Nurmantyo (Angkatan Darat), Marsekal Hadi Tjahjanto (Angkatan Udara), dan Jenderal Andika Perkasa (Angkatan Darat) (setara-institute.org, 28 Juni 2022).

Penunjukan kandidat Panglima TNI oleh Presiden pada dasarnya telah melalui pertimbangan yang matang, terutama terkait kinerja, prestasi, dan kapabilitas untuk memajukan TNI, baik secara internal organisasi maupun dalam menjalankan fungsi pertahanan negara. Nama calon Panglima TNI diperoleh dari usulan Presiden melalui penyerahan Surpres calon Panglima TNI kepada DPR. Setelah menerima nama calon Panglima TNI, surat dibawa ke rapat pimpinan dan Badan Musyawarah DPR RI.

Selanjutnya, DPR melakukan persetujuan yang disampaikan paling lambat 20 hari, tidak terhitung masa reses. Setelah disetujui, DPR melalui Komisi I akan menggelar *fit and proper test* terhadap calon Panglima TNI pilihan Presiden. Apabila disetujui oleh DPR, kemudian keputusan Komisi I dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebelum

diberikan kepada Presiden. Mekanisme ini ditargetkan selesai sebelum memasuki masa reses DPR RI pada 16 Desember 2022 (Kompas, 29 November 2022: 3). Dalam hal ini, DPR juga berhak untuk menolak atau tidak menyetujui calon Panglima TNI yang diusulkan Presiden dengan menyampaikan alasan tertulis atas ketidaksetujuan tersebut. Apabila usulan calon Panglima TNI tidak disetujui, maka Presiden harus mengusulkan satu orang calon lain sebagai penggantinya. Pada pelaksanaan *fit and proper test* terhadap calon Panglima TNI yang dilaksanakan pada 2 Desember 2022, Komisi I DPR RI telah menyatakan persetujuan terhadap Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI.

### **Tantangan Penguatan Profesionalisme TNI**

Tentara yang profesional adalah tentara yang yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi (Djuyandi, 2012: 517). Penguatan profesionalisme TNI penting dilakukan untuk menjamin kesiapsiagaan serta kualitas prajurit dalam menghadapi ancaman lingkungan strategis. Oleh karena itu, Panglima TNI dituntut untuk memiliki kapabilitas komprehensif dalam membangun profesionalisme militer.

Secara konkret, Panglima TNI dihadapkan pada berbagai tantangan dalam membangun penguatan profesionalisme militer. Setidaknya terdapat lima agenda pembenahan TNI yang penting untuk ditindaklanjuti. *Pertama*, penataan organisasi TNI dalam penguatan sumber daya manusia (SDM) TNI dan dalam mengurai permasalahan

penumpukan perwira *nonjob*. Upaya untuk penguatan SDM TNI penting untuk terus ditingkatkan. Sebagai komponen utama pertahanan negara, penguatan kapabilitas SDM TNI merupakan hal mutlak dalam membangun kekuatan dan kesiapsiagaan TNI yang profesional, tangguh, dan memiliki daya gentar. Panglima TNI juga diharapkan dapat meneruskan kebijakan *rightsizing dan proporsional growth* pada kelembagaan TNI dan terus mengembangkan formulasi yang tepat menyelesaikan problem penumpukan perwira *nonjob* (nasional.kompas.com, 10 Agustus 2022). Hal tersebut diperlukan agar masalah penumpukan perwira tidak berimplikasi pada upaya penempatan TNI dalam jabatan sipil. Selain membebani anggaran TNI, permasalahan tersebut juga mempengaruhi efisiensi kerja institusi. Oleh karena itu, diperlukan restrukturisasi organisasi yang sesuai dengan Undang-Undang TNI dan sejalan dengan agenda reformasi TNI.

*Kedua*, kecelakaan alutsista. Dalam sepuluh tahun terakhir, tercatat total 16 kejadian kecelakaan alutsista, mulai dari pesawat dan helikopter jatuh hingga kapal tenggelam. Kondisi alutsista TNI saat ini rata-rata usia pakainya mencapai 25 hingga 40 tahun (cnnindonesia.com, 20 Juli 2022). Selain memengaruhi tingkat kesiapan operasional, hal ini juga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Hal tersebut juga berpengaruh pada keselamatan prajurit dengan risiko gugur dalam latihan. Evaluasi menyeluruh atas alutsista tiga matra penting untuk terus dilakukan, termasuk melanjutkan upaya modernisasi alutsista untuk mendukung kapabilitas komponen utama pertahanan serta dalam mewujudkan kemandirian pertahanan.

*Ketiga*, interoperabilitas antarmatra. Interoperabilitas merupakan kunci dalam pembangunan kekuatan pertahanan yang tangguh, baik di darat, laut, dan di udara (antaranews.com, 28 November 2022). Oleh karena itu, optimalisasi kekuatan gabungan ketiga matra TNI perlu terus ditingkatkan melalui peningkatan intensitas latihan gabungan dan penguatan kapabilitas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Hal tersebut diperlukan dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman strategis dan geopolitik global, terutama dinamika keamanan terkait potensi terjadinya eskalasi di Laut China Selatan.

*Keempat*, penguatan diplomasi pertahanan. Keterlibatan TNI dalam diplomasi pertahanan selama ini terlihat dari komitmen dalam misi pasukan perdamaian PBB, keterlibatan dalam forum-forum multilateral seperti *ASEAN Defense Ministerial Meeting* (Sudarsono dkk, 2018: 85). Namun demikian, kapabilitas TNI dalam diplomasi pertahanan perlu terus ditingkatkan, mengingat posisi Indonesia yang berada di antara tingginya potensi konflik di kawasan Asia Pasifik, terutama di tengah upaya penyeimbangan kekuatan dominasi China oleh pakta pertahanan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia (AUKUS). TNI juga perlu meningkatkan kerja sama, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara-negara yang berkepentingan di kawasan Asia Pasifik untuk membangun *confidence building measure*. Kerja sama dalam bentuk *joint exercise* seperti program Garuda *Shield* juga penting untuk terus dilakukan dengan berbagai negara untuk meningkatkan keterampilan prajurit TNI dalam operasi militer perang maupun nonperang.

*Kelima*, kesejahteraan prajurit. Kesejahteraan adalah faktor utama

dalam membangun postur TNI yang profesional dalam melaksanakan tugas pokok sebagai alat pertahanan negara (nasional.kompas.com, 23 November 2022). Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan perlu sejalan dengan peningkatan kemampuan dan kapasitas prajurit yang harus terus dikembangkan sesuai tantangan serta dinamika lingkungan strategis yang ada. Panglima TNI perlu mendorong keberlanjutan berbagai program peningkatan kesejahteraan, seperti perbaikan rumah dinas prajurit dan upaya penyesuaian tunjangan kinerja prajurit.

Berdasarkan uraian di atas, komitmen untuk terus membangun kapasitas dan kapabilitas TNI penting untuk dilaksanakan, mulai dari pembenahan organisasi dan personel, evaluasi dan modernisasi alutsista, penguatan interoperabilitas, diplomasi pertahanan, dan kesejahteraan prajurit. Hal tersebut dibutuhkan untuk menjamin ketepatan dan keberhasilan dalam melaksanakan tugas, dalam menghadapi berbagai dimensi ancaman geopolitik global serta isu strategis, seperti: Laut China Selatan, Laut China Timur, Perang Rusia dan Ukraina, gangguan keamanan di Papua, rencana pembangunan Ibu Kota Negara, serta dinamika situasi politik menjelang Pemilu 2024.

Tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara adalah menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan. Untuk itu, TNI dituntut untuk profesional, yaitu mampu menjalankan tugas secara efektif, memiliki kapabilitas dan daya gentar tinggi, terfasilitasi dalam pendidikan dan pelatihan, serta kesejahteraan yang tercukupi. Panglima TNI terpilih diharapkan dapat menjalankan kepemimpinannya dengan menjalankan mandat yang diberikan

serta berkomitmen untuk penguatan profesionalisme TNI dalam upaya mewujudkan komponen pertahanan negara yang optimal.

### Penutup

Pergantian Panglima TNI perlu dipandang sebagai estafet kepemimpinan untuk terus menjaga komitmen penguatan profesionalisme TNI. Panglima TNI terpilih dituntut untuk mampu mewujudkan agenda pembenahan organisasi serta penguatan kapabilitas prajurit untuk mewujudkan TNI yang tangguh dalam menjalankan tugasnya dalam menjaga kedaulatan negara. Panglima TNI terpilih perlu melanjutkan komitmen pembenahan dan pemenuhan kebutuhan organisasi, serta berorientasi pada kesiapsiagaan menghadapi ancaman lingkungan strategis dan geopolitik. Agenda penguatan profesionalisme TNI antara lain penataan organisasi TNI, evaluasi kecelakaan alutsista dan keselamatan prajurit, penguatan interoperabilitas antarmatra, diplomasi pertahanan, dan kesejahteraan prajurit.

Proses pergantian Panglima TNI telah melalui tahapan yang sesuai dengan Undang-Undang tentang TNI, yaitu pengajuan usulan nama oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI melalui pelaksanaan *fit and proper test*. Selain itu, penunjukan calon Panglima TNI juga telah mewakili rotasi antarmatra, melalui usulan Panglima TNI dari matra Angkatan Laut. Dalam penetapan calon Panglima TNI, Komisi I DPR RI memegang peran krusial dalam memberikan persetujuan atas usulan Presiden. Sebagai otoritas sipil yang memiliki legitimasi politik secara demokratis, Komisi I DPR RI turut berperan dalam membentuk profesionalisme militer melalui fungsi pengawasan, salah satunya dalam melaksanakan *fit and proper test*

terhadap calon Panglima TNI secara objektif.

### Referensi

- "Calon Panglima TNI Dinilai Harus Perjuangkan Kesejahteraan Prajurit", 23 November 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/23/14554061/calon-panglima-tni-dinilai-harus-perjuangkan-kesejahteraan-prajurit>, diakses 28 November 2022.
- "Daftar 16 Kecelakaan Kendaraan Tempur TNI dalam 10 Tahun Terakhir" 20 Juli 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220720061242-20-823636/daftar-16-kecelakaan-kendaraan-tempur-tni-dalam-10-tahun-terakhir>, diakses 28 November 2022.
- Djuyandi, Yusa. 2012. Membangun Demokrasi Melalui Profesionalisme Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Humaniora*, Vol. 3 No. 2 Oktober: 512-522.
- "Jalan Yudo Jadi Panglima Bakal Mulus," *Kompas*, 25 November 2022, hal. 3.
- "Laksamana Yudo Calon Panglima TNI," *Republika*, 29 November 2022, hal. 3.
- "Panglima TNI Baru Harus Fokus Pada Penguatan Kogabwilhan," 28 November 2022, <https://mataram.antaranews.com/berita/236973/panglima-tni-baru-harus-fokus-pada-penguatan-kogabwilhan>, diakses 28 November 2022.
- "Proses Persetujuan di DPR Hanya Butuh Tiga Hari," *Kompas*, 29 November, hal. 3.
- "Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI," 28 November

2022, <https://nasional.tempo.co/read/1662068/puan-jelaskan-mekanisme-setelah-dpr-terima-surpres-calon-panglima-tni>, diakses 28 November 2022.

Sudarsono, Budyanto Putro dkk. 2018. Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mencapai Kepentingan Nasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 8 No. 3, Desember.

“Wacana Alihkan Penumpukan Perwira TNI ke Kementerian Bukan Solusi,” 10 Agustus 2022,

<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/10/05300021/wacana-alihkan-penumpukan-perwira-tni-ke-kementerian-bukan-solusi>, diakses 28 November 2022.

Yosarie, Ikhsan. “Rotasi Antarmatra Dalam Pergantian Panglima TNI,” 28 Juni 2022, <https://setara-institute.org/rotasi-antarmatra-dalam-pergantian-panglima-tni/>, diakses 28 November 2022.



Aulia Fitri  
[aulia.fitri@dpr.go.id](mailto:aulia.fitri@dpr.go.id)

Aulia Fitri S.IP M.Si(Han), menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan tahun 2010 dan S2 Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan pada tahun 2015. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Pertama di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Karya tulis ilmiah yang diterbitkan antara lain “Kebijakan Siber Nasional di Era Globalisasi Informasi”, “Keberlanjutan Program Pesawat Tempur KFX/IFX dalam Industri Pertahanan Indonesia”, “Tugas Perbantuan TNI Dalam Penanganan Terorisme”, “Rencana Penempatan Militer Aktif dalam Jabatan Sipil dan Reformasi TNI”, “Komando Operasi Khusus TNI dan Penanganan Terorisme di Indonesia”, “Implementasi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Penguatan Sistem Pertahanan dalam RPJMN 2015-2019”.

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.